

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bagi suatu organisasi terutama pada pemerintahan, Saat menyajikan informasi yang menyeluruh mengenai aspek keuangan suatu entitas, laporan keuangan yakni alat yang krusial. Pemerintah sendiri bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara selama periode tertentu. Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan data yang relevan terkait segala hal tindakan transaksional entitas pelapor sepanjang periode pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan ialah menyuguhkan informasi kepada pengguna terkait kondisi keuangan entitas pelapor, arus kas, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan. Informasi ini membantu dalam pengambilan keputusan dan penilaian terkait alokasi sumber daya. Hal tersebut ada pada Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006. Aturan ini menggarisbawahi bahwa neraca, operasional, arus kas, perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, perubahan kelebihan saldo anggaran, dan catatan atas laporan keuangan ialah format yang dibutuhkan untuk laporan keuangan.

Presentasi laporan keuangan yakni salah satu bagian dari agenda pemenuhan kewajiban untuk memenuhi persyaratan timbal balik yang diatur oleh persyaratan hukum. Selain itu, komponen-komponen yang wajib dipenuhi tercantum dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang disajikan wajib berkualitas tinggi. Apabila suatu lembaga pelapor menyajikan

laporan keuangan yang memenuhi empat kriteria, maka laporan tersebut dianggap berkualitas tinggi, yang termasuk, yakni relevansi, keandalan, dapat dibandingkan dan bisa dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah juga bisa dinilai dari opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ada empat opini yang diserahkan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW).

Laporan keuangan yang berkualitas bisa menyuguhkan manfaat yang besar bagi kebijakan pemerintah di masa depan. Kualitas pelaporan keuangan dilandaskan pada audit independen yang dijalankan oleh BPK pada untuk memahami tingkat keakuratan data yang dimiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Mengikuti Putri *et al.* (2021) Laporan keuangan berkualitas baik, atau idealnya memenuhi karakteristik kualitas dan bisa diinterpretasikan, akan dipakai oleh semua entitas sebagai pendoman untuk merumuskan kebijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Seperti yang terjadi pada pemerintahan di Kota Bekasi yang punya laporan keuangan, diharapkan juga punya kualitas laporan keuangan yang baik.

Berikut perkembangan opini pemeriksaan LKPD tahun 2016 – 2022 di Kota Bekasi sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD TA 2016 – 2022  
di Kota Bekasi**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP

**Sumber : Data di peroleh dari BPK Jawa Barat**

Berlandaskan Pada Tabel 1.1 menjabarkan bahwa perkembangan mengenai opini pemeriksaan LKPD tahun 2021 dan 2022 mendapati perubahan dari WTP menjadi WDP. Oleh sebab itu, BPK masih menemukan permasalahan signifikan dalam LKPD Kota Bekasi tahun 2022. Beberapa diantaranya ialah masalah dalam pengelolaan aset, yakni aset kemitraan yang dikelola pengguna bersama PT KAP, masih belum memadai. Selain itu, pihaknya kini belum bisa menjamin kewajaran aset tetap tanah yang dibeli pada 2021 sebab ada permasalahan hukum terkait perolehan tanah di SDN Bojong Rawa Lumbu I dan VIII, tanah Polder 202, serta tanah Polder Kranji. Oleh sebab itu, pemerintahan Kota Bekasi wajib memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan cara mengidentifikasi elemen-elemen penting yang bisa mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan, salah satunya ialah dengan menaikkan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam rangka menyediakan informasi keuangan berkualitas tinggi, sumber daya manusia sangatlah penting (Tran *et al.*, 2021). Kualitas laporan keuangan tidak lepas dari kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami serta punya keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan (Rifany *et al.*, 2021). Kompetensi ialah suatu kecakapan guna menjalankan tugas dengan didukung oleh pengetahuan, kemampuan yang didukung oleh pola pikir kerja yang sesuai dengan pekerjaan (Anto *et al.*, 2023). Hal ini selaras dengan penelitian yang dijalankan oleh Fuping *et al.* (2023); Lian *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan didorong secara baik serta substansial oleh kompetensi sumber daya manusia. Maksudnya, laporan keuangan akan lebih berkualitas bila sumber daya manusianya lebih kompeten. Namun tidak selaras dengan temuan penelitian Anto *et al.* (2023);

Hanly *et al.* (2023); Karyatni *et al.* (2020) menemukan bahwa adanya pengaruh positif namun tidak signifikan antara kompetensi serta kualitas laporan keuangan, maknanya semakin baik kompetensi sumber daya manusia, tidak berarti kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik.

Selain menaikkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) juga berperan penting dalam menaikkan kualitas pelaporan keuangan. *Corporate governance* yakni metode dan kerangka kerja organisasi untuk menaikkan akuntabilitas dan kinerja bisnis dengan tujuan jangka panjang untuk memperoleh keuntungan bagi pemegang saham namun juga mempertimbangkan kewajiban hukum dan moral pada pemangku kepentingan lainnya (Herdiyopie *et al.*, 2020). Temuan penelitian yang dijalankan oleh Salukh *et al.* (2022); Kaawaase *et al.* (2021) memperlihatkan kesesuaian dimana *corporate governance* berpengaruh menguntungkan pada kualitas laporan keuangan, yang berarti implementasi prinsip-prinsip GCG yang meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, pengawasan dan pertanggungjawaban maka akan menaikkan kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh Kabwe (2023) yang memperlihatkan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada kualitas laporan keuangan, maknanya dengan menerapkan GCG saja tidak menjamin secara pasti peningkatan kualitas laporan keuangan.

Elemen penting lainnya yang mendorong kualitas pelaporan keuangan ialah sistem pengendalian internal. Pengertian sistem pengendalian internal ialah suatu prosedur yang menjamin tercapainya tujuan organisasi mengenai efektivitas dan

efisiensi operasional, pelaporan keuangan yang bisa dipercaya, dan kepatuhan hukum (Ajao *et al.*, 2020). Hal ini sama dengan temuan penelitian yang dijalankan oleh Kwanbo *et al.* (2023); Anuruddha *et al.* (2021) memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh baik pada kualitas laporan keuangan, maknanya bila perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal dengan optimal maka bisa memperoleh data akuntansi yang akurat dan mengakibatkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun temuan ini berkaitan dengan penelitian yang dijalankan Abdulai *et al.* (2021); Nurlinda (2021) menegaskan bahwa korelasi antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan, sebab tidak semua indikator dari sistem pengendalian internal bisa mendorong kualitas laporan keuangan.

Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada variabel moderasi yakni sistem pengendalian internal, sebab dalam penelitian terdahulu jarang dipakai sebagai variabel moderasi dan belum ada penelitian serupa khususnya di Kota Bekasi. Alhasil, penulis merasa tertarik guna mendalami apakah sistem pengendalian internal bisa menambah atau mengurangi bagaimana variabel independen mendorong variabel dependen dalam penelitian ini.

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas ada ketidaksamaan temuan penelitian yang menjadi gap penelitian. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan *Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi”**.



## **1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berlandaskan paparan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang bisa ditemukan ialah sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat penting sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan suatu negara.
2. Sumber daya manusia harus mempunyai kompetensi yang dibutuhkan, agar laporan keuangan berkualitas dapat dihasilkan.
3. *Corporate governance* yang lemah bisa mendorong adanya kecurangan di dalam perusahaan.
4. Sistem pengendalian internal sangat mendorong kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berlandaskan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, bukan hanya sebab keterbatasan waktu dan biaya dalam menjalankan penelitian ini, namun juga guna menghindari pembahasan yang lebih luas. penelitian ini lebih fokus pada variabel yang diteliti yakni kompetensi dan *corporate governance* pada kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian akan dilaksanakan pada 12 Kecamatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi.

### 1.2.3 Perumusan Masalah

Berlandaskan paparan diatas, maka rumusan masalah yang bisa ditemukan dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi?
3. Apakah sistem pengendalian internal mampu memoderasi kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi?
4. Apakah sistem pengendalian internal mampu memoderasi *corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas, maka maksud penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Guna memahami apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi.
2. Guna memahami apakah *corporate governance* berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi.
3. Guna memahami apakah sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi.

4. Guna memahami apakah sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan terkait kompetensi dan *corporate governance* pada kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan bagi yang membutuhkan serta bisa menjadi landasan untuk penelitian dan karya ilmiah terkait pengaruh kompetensi dan *corporate governance* pada kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di Kecamatan dan BPKAD Kota Bekasi.